



Sistem Pemilu dan Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan

Oleh Chusnul Mar'iyah, Ph.D

www.chusnulmariyah.or.id

cmariyah2004@yahoo.com



Chusnul Mar'iyah, Ph.D

Pendidikan:

- Doktor Ilmu Politik dari Sydney University , 1998
- Sarjana Ilmu Politik, FISIP UI, 1987
- Sekolah Pendidikan Guru, SPG Negeri Lamongan, 1979
- Short Courses: Federalism, Easton University , USA 1997; Transaprancy in Political Parties, Oxford University, UK 2002; Urban Studies, ANU, Australia 1993; Japanese Studies, Hosei University, Jepang 1985 dll.

Pekerjaan:

- Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia 1982-sekarang
- Research Fellow , the V ictoria Univ ersity, Melbourne, A ustralia, 2008
- Anggota Komisi Pemilihan Umum 2001-2007
- Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik, FISIP UI, 2000-2003
- Dosen Politik Asia Tenggara, Sy dney University , A ustralia 1992-1996
- Akti v isPerempuan, Perempuan Akti v is



Introduction

- Demokrasi, perempuan dan *Electoral gender quota* : transisi politik membuat perubahan konsensus politik, tuntutan gerakan perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan
- Demokrasi: full participation and political equality, *from the politics of ideas to the politics of presence*
- Terdapat sekitar 50 negara di dunia yang menggunakan model quota untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen
- Quota dapat dilakukan dengan *voluntary* oleh partai politik atau secara perundang-undangan



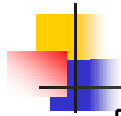
Model peningkatan keterwakilan perempuan

- Scandinavian model: *the incremental track to equal political representation for women and men*, bahwa peningkatan keterwakilan perempuan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai *gender equality*.
- Quota perempuan diperkenalkan pada tahun 1980an pada saat keterwakilan perempuan di parlemen sudah mencapai 20-30 per cent (*a strong power base*).
- Denmark, Norway and Sweden membutuhkan waktu 60 tahun untuk mencapai 20 %; dan 70 tahun untuk mencapai 30 %.



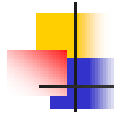
Model Amerika Latin

- *The fast track*, gerakan perempuan tidak mau menunggu lama seperti pengalaman di negara-negara scandinavian tersebut
- Digunakan electoral gender quota sebagai tindakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen
- Contoh: Costa Rica dari 19 ke 35 %, di Afrika Selatan memiliki keterwakilan perempuan 30 % pada saat pertama kali dilaksanakan pemilu setelah perubahan rezim (demokratisasi)



Electoral system and gender quota

country	Women %	Type of quota	Electoral system
Rwanda	56,3 (2008)	C, L	List-PR
Sweden	46,4 (2006)	P	List-PR
Denmark	38,0 (2007)	NQ	List-PR
Finland	40,0 (2007)	NQ	List-PR
Netherlands	42,0 (2006)	P	List-PR
Norway	39,6 (2009)	P	List-PR
Cuba	43,2 (2008)	NQ	NDE
Mozambique	39,6 (2009)	P	List-PR



Electoral system and gender quota

country	Women %/ rank	Type of quota	Electoral system
Spain	36,6 (2006)	P	MMP
Belgium	38,0 (2007)	L	List-PR
Argentina	38,5 (2009)	C,L	List-PR
Germany	32,8(2009)	P	MMP
South Africa	44,5 (2009)	P	List-PR
Iceland	42,9 (2009)	P	List-PR
Indonesia	18,0 (2009)	L	List-PR



Keterangan

- Constitutional quotas (C), quotas by law (L), political party quotas only (P), no quota (NQ)
- Proportional Representation (list-PR), mix member proportional (MMP), non Democratic elections (NDE)
- Data diambil dari IPU, 28 February 2010



Pemilu 2004: memperkenalkan sistem Quota untuk calon legislatif perempuan

- UU no 12 tahun 2003 pasal 65 tentang calon legislatif sedikitnya 30 %
- UU no 31 tahun 2002 pasal 7 dan 13
- Peningkatan jumlah perempuan melalui peningkatan jumlah caleg perempuan
- Peningkatan keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota relatif signifikan (Bukit Tinggi 25 %, Kota Yogyakarta 22 %, data pada pemilu2 sebelumnya untuk provinsi tidak lebih dari 5 % dan untuk kabupaten/kota hanya rata2 1 %, lihat data pemilu 2004 dan 2009 untuk Kabupaten/Kota dan Provinsi), sementara secara nasional meningkat dari 8 % menjadi 11 % (pada pemilu 2004)



Pemilu 2009

- Bagaimana peningkatan jumlah perempuan dari 11 % menjadi 18 % pada pemilu 2009 dengan memasukkan model zipper sistem dan suara terbanyak?
- Persoalannya pemilu 2009 merupakan *the liberal machiavelian election*, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat
- Intervensi administrasi pemilu seringkali dilakukan dalam bentuk rekayasa konstitusi, penguasaan dan pengendalian lembaga penyelenggara pemilu, subversi peraturan dan aturan pemilu, manipulasi proses pemilu, pendaftaran pemilih dan penyelenggaraan pemilu), seperti terlihat di Gambia, Nigeria dan Ghana. Di Ghana, menyambut pemilu 1996, pemimpin oposisi menyatakan sangat khawatir bahwa telah terjadi *... a swollen and inaccurate voters' register, providing opportunity, in combination with various loopholes in electoral procedures, for under-age voting, stuffing ballot boxes and other ways of inflating the government's vote...* (Jeffries, 1998: 189-208).



Problem dan Strategi

- sedikit perempuan yang dianggap memiliki kemampuan atau kualitas untuk menjadi calon legislatif
- Anggapan masih sedikit perempuan yang memiliki *resources* dan komitmen publik
- Adanya secara formal atau informal diskriminasi terhadap perempuan dalam politik, terjadi proses peminggiran dan *glass ceilings*
- Resistensi terhadap kuota oleh para elit partai politik



strategi

- *Women empowerments, capacity building*, untuk meningkatkan komitmen perempuan dalam ranah publik (*women judge by society based on their presumption, men judge based on individual merit*)
- Partai politik harus secara aktif merekrut perempuan (memperkuat jaringan dengan *civil society*)
- Membuktikan bahwa kuota gender dapat meningkatkan efektifnya kebijakan publik yang ramah gender



Sistem penyelenggaraan pemilu

- Pemahaman KPU dalam implementasi peningkatan keterwakilan perempuan, contoh pada pemilu 2004 partai politik dapat menambahkan hanya dengan caleg perempuannya pada tahapan memperbaiki persyaratan caleg.
- *Electoral border*: magnitude daerah pemilihan yang besar (pilihan 3-6 kursi dalam satu Dapil atau 6 – 12 kursi dalam satu dapil) memberikan kesempatan kompetisi yang lebih ramah gender. Perjuangan pengambilan putusan Dapil adalah perjuangan anggota Perempuan KPU
- Dengan kata lain sistem pemilihan PR lebih ramah gender dibanding single member constituency (distrik)
- "Amerikanisasi kampanye" dan persoalan *money politics* menjadi hambatan utama dalam kompetisi pemilu



Dukungan Partai

- Tidak jelasnya komitmen dan kebijakan dari partai politik dalam meningkatkan *gender equality*
- Perebutan nomor urut dalam daftar caleg (pada pemilu 2009 digunakan UU yang memberikan kesempatan bahwa dari 3 nomor urut harus ada satu perempuan)
- Daftar urutan caleg masih sangat penting posisinya (memahami struktur dan proses rekrutmen caleg di Partai Politik), bagaimana proses rekrutmen perempuan di partai politik? Relasi kekuasaan ataukah memiliki kemampuan leadership, agenda yang kuat untuk perjuangan kebijakan publik yang ramah gender
- Pertanyaannya apakah suara terbanyak diyakini memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterwakilan perempuan (persentase terbesar perempuan yang terpilih di DPR adalah nomor satu dan nomor dua)?



Electoral quota dan kebijakan publik

- Memiliki dampak yang sangat besar untuk menekan partai politik dalam meningkatkan jumlah perempuan baik sebagai caleg maupun terpilih
- Partai politik dan caleg memenangkan pemilu sebagian besar bukan didasarkan kepada posisi kebijakan yang akan diambil, namun lebih didasarkan alasan memiliki basis massa, basis sosial, basis ekonomi dan jaringan. Sementara caleg perempuan sebagian besar belum dapat menyamai posisi caleg laki-laki dalam konteks tersebut di atas.



penutup

- Peningkatan jumlah perempuan di parlemen harus diikuti dengan kebijakan publik yang ramah gender untuk dapat mempertahankan pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen
- Walaupun perempuan sudah sangat aktif dalam kegiatan politik di masyarakat, namun masih sangat sulit untuk dapat menembus *critical mass* dalam *electoral politics* di setiap tingkatan parlemen (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota)



penutup

- Perlu dilakukan studi lanjutan tentang meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan dan hubungannya dengan kebijakan publik? Perempuan yang terpilih dapat juga anti-feminis dan kemungkinan bahkan menolak inisiatif perjuangan feminis (*pro-conventional agenda patriarchy*)
- Contoh agenda kebijakan *gender interests, domestic violence, rape, gender equity stated as 'men and women'*
- Selamat berjuang!



Referensi

- UU no 12 tahun 2003 yang kemudian diganti UU no 10 tahun 2008 tentang pemilu, UU no 31 tahun 2002 tentang partai politik
- Dahlerup, Drude and Lenita Freidenvall, "Quota as a 'fast track' to Equal Representation for women", *International Feminist Journal of Politics*, 7:1 March 2005, 26-48.
- Adejumbi, Said. 'Elections in Africa: A Fading Shadow of Democracy?' in *International Political Science Review* (2000), 21: 1, 59-73.
- Huntington, S. and C.R. Moore. *Authoritarian Politics in Modern Society* (New York: Basic Books, 1970).
- Jeffries, Richard. 'The Ghanaian Elections of 1996: Towards the consolidation of democracy?' in *African Affairs* (1998), 97, 189-208.
- Internasional Parliamentary Union, 28 february 2010.
- Rose, Richard. *Ed. International Encyclopedia of Elections* (London, Macmillan Ltd: 2000).